

so, tetap berjuang ya

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tasikmalaya dalam pengelolaan limbah medis di RSUD dr. Soekardjo. Latar belakang penelitian didasarkan pada urgensi pengelolaan limbah medis yang aman dan sesuai regulasi, khususnya pada masa pandemi COVID-19 yang menyebabkan peningkatan signifikan volume dan risiko limbah medis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap DLH Kota Tasikmalaya, pihak RSUD dr. Soekardjo, serta pemangku kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan limbah medis di RSUD dr. Soekardjo telah dilaksanakan sesuai dengan kerangka regulasi yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021. Kejelasan standar dan tujuan kebijakan tercermin dari penerapan pemilahan limbah medis yang relatif disiplin oleh RSUD serta pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemantauan rutin oleh DLH Kota Tasikmalaya. Namun demikian, implementasi kebijakan belum sepenuhnya optimal, yang ditandai oleh keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan fasilitas teknis pengolahan limbah, belum adanya nota kesepahaman (MoU) yang mengatur koordinasi formal antara DLH dan RSUD, serta tingginya ketergantungan RSUD terhadap pihak ketiga dalam proses pemusnahan limbah medis. Selain itu, lonjakan volume limbah medis selama pandemi COVID-19 turut menjadi faktor penghambat efektivitas implementasi kebijakan. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan limbah medis oleh DLH Kota Tasikmalaya berada pada kategori cukup efektif, namun masih memerlukan penguatan koordinasi kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya, serta perumusan strategi kebijakan yang berkelanjutan agar tata kelola limbah medis di Kota Tasikmalaya dapat berjalan lebih optimal dan responsif terhadap situasi krisis di masa mendatang.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan Publik, Pengelolaan Limbah Medis, RSUD Tasikmalaya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), UU No. 32 Tahun 2009, PP No. 101 Tahun 2014, dan Permen LHK No. 6 Tahun 2021.

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of policies by the Environmental Agency (Dinas Lingkungan Hidup/DLH) of Tasikmalaya City in managing medical waste at dr. Soekardjo Regional General Hospital. The background of this research is the urgency of safe and regulated medical waste management, particularly during the COVID-19 pandemic, which significantly increased the volume and risk of medical waste. This study employs a descriptive qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation involving the Environmental Agency of Tasikmalaya City, dr. Soekardjo Regional General Hospital, and relevant policy stakeholders. The results indicate that the implementation of medical waste management policies has generally been carried out in accordance with the prevailing regulatory framework, including Law No. 32 of 2009, Government Regulation No. 101 of 2014, and Minister of Environment and Forestry Regulation No. 6 of 2021. The clarity of policy standards and objectives is reflected in the disciplined practice of waste segregation at the hospital and the routine monitoring conducted by the Environmental Agency. However, the policy implementation has not yet been fully optimal, as evidenced by limitations in human resources and technical facilities, the absence of a formal memorandum of understanding (MoU) between the Environmental Agency and the hospital, the hospital's dependence on third-party service providers for waste treatment and disposal, and the surge in medical waste volume during the COVID-19 pandemic. Overall, this study concludes that the implementation of medical waste management policies in Tasikmalaya City can be categorized as moderately effective. Nevertheless, it requires strengthened institutional coordination, increased resource capacity, and sustainable policy strategies to ensure more optimal and resilient medical waste governance in the future.

Keywords: *publicpolicy implementation, medical waste management, RSUD dr. Soekardjo, Tasikmalaya Environmental Agency (DLH), Law No. 32/2009, Government Regulation No. 101/2014, Minister of Environment and Forestry Regulation No. 6/2021.*